



**PEMERINTAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**RENCANA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
2020**

**DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
2019**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan evaluasi dan telaahan terhadap Rencana Kerja tahun sebelumnya, isu-isu penting/strategis terkini dan usulan kegiatan dari masyarakat. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan berisikan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini sebagai acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2020 untuk menjawab atau meminimalisir isu-isu terkini dan permasalahan-permasalahan di Bidang Industri Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Demikian Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020 kami susun, semoga dapat menjadi pedoman dalam melakukan Kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat di tahun 2020.

Pangkalan Bun, 24 Juli 2020

Kepala Dinas Perindagkop
Kabupaten Kotawaringin Barat



Drs. MUHAMMAD YADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19610420 198903 1 009

D A F T A R I S I

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2018.....	5
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	18
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.	19
BAB V PENUTUP	29
Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam rangka mendukung program kerja Bupati Kotawaringin Barat yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan visi **“Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata dan Ikhlas”** dan sebagai perwujudan dari bagian rencana strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat. Visi tersebut dijabarkan dengan **Misi** sebagai berikut :

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olah raga;
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat;
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis;
6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata;

Misi-misi tersebut dijabarkan kedalam sasaran strategis SKPD dan setiap tahunnya mempunyai target. Untuk mencapai target tersebut dilaksanakan program dan kegiatan yang ditampung dalam suatu Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja ini juga harus mengacu kepada RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat. Setelah program dan rencana kerja disusun dan anggaran/pagu indikatif ditentukan oleh tim anggaran maka Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (RAPBD) pun dapat disusun untuk diusulkan kepada DPRD.

1.2.Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;

11. Peraturan Bupati No. 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No. Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Agar perencanaan kegiatan dan program lebih terarah dan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat dan Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Menjabarkan rencana kerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3. Sebagai acuan bagi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun anggaran 2020 dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan.
4. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kabupaten Kotawaringin Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020, terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 dan capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang didukung dengan Perbup No. 64 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat.

SKPD Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat baru beroperasi pada tahun 2018. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk periode Renstra 2017- 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Sasaran Renstra PD	Indikator Kinerja Sasaran PD	Target (%)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran	90	90	90	95	95	95
Meningkatkan tatakelola organisasi yang akuntabel dan profesional	Prosentase ketercukupan sarana dan prasarana apratur	85	85	90	90	95	95
Meningkatnya Pertumbuhan IKM	Persentase Tingkat Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	8	10	12	14	16	18
Meningkatnya Nilai Tambah hasil produksi IKM	Persentase Peningkatan Nilai tambah sektor IKM	6	8	10	12	14	16
Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan pokok dan barang penting	Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar waktu (YoY) kurang dari 9%	< 9	< 9	< 9	< 9	< 9	< 9
Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor daerah	Persentase Tingkat Pertumbuhan Nilai Ekspor Daerah	5	5	6	7	9	10
Meningkatnya pelayananan dibidang Kemetrolgian	Persentase jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah	11,06	12,11	13,16	72	75	80
Meningkatnya tata kelola Pasar Rakyat	Persentase pengelolaan teknis pasar rakyat yang ditingkatkan	5,00	10,00	19,00	29,00	38,00	48,00

Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	2,41	2,49	2,60	2,73	2,85	3,11
Tumbuh dan Berkembangnya Usaha Mikro	Persentase UKM terhadap UMKM	1,21	1,23	1,25	1,27	1,29	1,31

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (2018) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2019), mengacu pada APBD tahun 2019 yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2018, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018. Berikut ini Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 Kabupaten Kotawaringin Barat

Tabel. 2.2.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 Kabupaten Kotawaringin Barat

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pengukuran capaian kinerja mencakup penetapan indikator dan capaian kerjanya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang ditetapkan dalam RENSTRA.

Pengukuran kinerja berisi indikator kinerja dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan secara rinci dapat dilihat pada lampiran. Sedangkan pengukuran kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran	91,00	91,00	100,00
2	Meningkatkan tatakelola organisasi yang akuntabel dan profesional	Prosentase ketercukupan sarana dan prasarana apratur	85,00	85,00	100,00
3	Meningkatnya Pertumbuhan IKM	Persentase Tingkat Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	10,00	-5,54	-55,36
4	Meningkatnya Nilai Tambah hasil produksi IKM	Persentase Peningkatan Nilai tambah sektor IKM	8,00	32,82	410,21
5	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan pokok dan barang penting	Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar waktu (YoY) kurang dari 9%	< 9	< 9	100,00
6	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor daerah	Persentase Tingkat Pertumbuhan Nilai Ekspor Daerah	5,00	9,92	198,40
7	Meningkatnya pelayananan dibidang Kemetrologian	Persentase jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah	12,11	19,19	158,45
8	Meningkatnya tata kelola Pasar Rakyat	Persentase pengelolaan teknis pasar rakyat yang ditingkatkan	10,00	10,00	100,00
9	Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi	Persentase Peningkatan Koperasi Berkualitas	6,00	7,00	116,67
10	Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	2,49	2,17	87,18
11	Tumbuh dan Berkembangnya Usaha Mikro	Persentase UKM terhadap UMKM	1,23	1,17	95,12

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu strategis yang dapat direkomendasikan berdasarkan identifikasi permasalahan Internal maupun External berkaitan dengan urusan dan kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

1. Perlunya Insfratuktur Penunjang Perindustrian.
2. Belum adanya Sentra Industri di daerah kabupaten kotawaring barat.
3. Belum optimalnya upaya pengembangan industri sector hilir.
4. Minimnya inovasi sebagai upaya pengembangan industri kecil / industri rumah tangga.
5. Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
6. Terus merosotnya nilai export bersih daerah.
7. Belum mandirinya daerah dalam pelayanan kemetrologian.
8. Potensi PAD sector Metrologi legal yang belum terserap secara optimal.
9. Pengelolaan dan penataan pasar rakyat menuju pasar rakyat ber SNI.
10. Masih belum optimalnya pengawasan distribusi barang.
11. Belum optimalnya produktivitas koperasi dan UMKM.
12. Minimnya Koperasi yang mampu melaksanakan RAT.
13. Kurangnya minat masyarakat untuk berwirausaha.

Dari isu-isu penting diatas dapat direkomendasikan beberapa catatan strategis sebagai berikut :

- a) Pengembangan IKM perlu didasarkan pada Rencana Pengembangan Industri Kabupaten dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah.
- b) Terus meningkatkan dan mempertahankan tingginya kontribusi Perdagangan terhadap pembentukan PDRB kabupaten kotawaringin barat melalui Revitalisasi pasar-pasar rakyat (tradisional), mempermudah akses distribusi barang serta perluasan cakupan pembinaan kelompok-kelompok pedagang kecil.
- c) Penting juga untuk ditingkatkan adalah monitoring perkembangan harga bahan pokok yang di update setiap hari atau 1 minggu sekali dan disajikan secara online dalam rangka mengurangi disparitas

harga bahan pokok antar wilayah kecamatan, yang harus ditindaklanjuti pula dengan adanya operasi pasar / pasar murah di beberapa wilayah utama untuk meredam fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok masyarakat.

- d) Peningkatan SDM Pelaku Koperasi lebih dititik beratkan kepada Pelatihan dan Bimbingan teknis manajemen usaha dan pertanggungjawaban keuangan koperasi sehingga diharapkan pertumbuhan jumlah koperasi yang mampu melaksanakan RAT dapat tumbuh menjadi koperasi yang mandiri dan berdaya saing.
- e) Penumbuhan Usahawan baru harus terus digalakan dan ditingkatkan sebagai dukungan pencapaian program nasional serta yang dapat berdampak langsung kepada masyarakat yang pada prosesnya akan mampu menyerap tenaga kerja dan diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan di tiap kecamatan.

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SOPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SOPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SOPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SOPD yang bersangkutan.

Berdasarkan review terhadap rancangan awal RKPD, terdapat gap/ kesenjangan antara target yang harus dicapai pada Renja SKPD 2020 dengan target akhir periode Renstra SOPD 2017-2022. Hal ini disebabkan dari pagu indikatif yang sudah disediakan untuk SOPD Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah untuk Tahun 2020 masih belum sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target akhir periode Renstra SOPD 2017-2022. Secara lengkap review terhadap rancangan awal Renja SOPD disajikan dalam tabel di Lampiran 1

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/Kegiatan SKPD bisa diusulkan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan bisa diusulkan SKPD kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melalui forum SKPD maupun forum lainnya sebelum penyusunan rencana kerja.

Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2020 sebagian merupakan usulan dari masyarakat yang disampaikan kepada SKPD dengan melihat prioritas, urgensi dan permasalahan yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran utama SKPD..

Tahun 2020 usulan dari masyarakat melalui Kelurahan/Kecamatan yang terkait dengan Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di akomodir melalui system perencanaan dan pengendalian daerah (SIMRAL) yang di bentuk oleh Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Analisis renstra K/L dan PD Kabupaten/Kota ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra PD Provinsi terhadap sasaran Renstra K/L dan renstra PD Kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing PD.

Hal tersebut diatas perlu perbaikan lingkungan usaha yang kondusif bagi peningkatan daya saing dibidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan perlu juga dilakukan peningkatan akses usaha kepada sumber daya produktif, kompetensi dan produktifitas usahanya.

Prioritas Nasional

Untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat, diperlukan sinkronisasi perencanaan program pembangunan baik yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Salah satu media untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan tersebut adalah penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang memuat selaras dengan visi pembangunan nasional yakni **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut **NAWA CITA**, yaitu :

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic.
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kebijakan masing-masing kementerian yang menangani urusan perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil menengah dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Kebijakan / Urusan	Sumber
PERINDUSTRIAN		
1	Pengembangan perwilayahan industri diluar Pulau Jawa	Renstra Kementerian Perindustrian
2	Penambahan populasi industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha industri berskala besar dan sedang dimana 50 persen tumbuh di luar Jawa serta tumbuhnya industri kecil sekitar 20 ribu unit usaha	
3	Peningkatan daya saing dan produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja)	
PERDAGANGAN		
1	Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama	Renstra Kementerian Perdagangan
2	Memperluas pangsa pasar ekspor di pasar prospektif dan hubungan perdagangan internasional	
3	Meningkatkan diversifikasi produk ekspor	
4	meningkatkan daya saing produk nasional	
5	Meningkatkan aksesibilitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	
6	Meningkatkan perlindungan konsumen	
7	Meningkatkan efisiensi sistem distribusi dan logistic	
8	Meningkatkan fasilitasi dan iklim usaha perdagangan	
KOPERASI DAN UKM		

1	Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi.	Renstra Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2	Peningkatan sumber daya manusia (SDM) kepada pelaku Koperasi dan UM	
3	Diversifikasi usaha dan pemasaran hasil usaha Koperasi dan UM.	
4	Penguatan kelembagaan Koperasi dan UM.	

Prioritas Provinsi

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014-2019, terdapat program prioritas yang sesuai dengan kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan menengah yaitu :

Dibidang Perdagangan dan perindustrian yaitu pengembangan dan penguatan ekonomi kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan dengan beberapa fokus sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan & perkembangan industri kecil dan menengah yang bertumpu pada sumber daya lokal yang berkelanjutan
2. Terbangunnya kawasan industri di Kalimantan Tengah
2. Meningkatnya kualitas perdagangan di Kalimantan Tengah
3. Meningkatnya Nilai Ekspor non migas
4. Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri.
5. Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa yang beredar
6. Meningkatnya penguatan kelembagaan pengujian dan sertifikasi mutu barang.
7. Meningkatnya penguatan kelembagaan kemetrolagian serta perdagangan barang dan jasa legal (sampai dengan tahun 2016)

Adapaun kebijakan dan sasaran diibidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu fokus terus mendorong Peningkatan sumber daya manusia (SDM) pelaku Koperasi dan UM serta Penguatan kelembagaan Koperasi dan UM.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) selain didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah, juga mengacu pada rumusan tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

pada logframe perencanaan terintegratif untuk pencapaian misi 3 dalam RPJMD, dapat dilihat bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berada pada posisi tugas untuk “Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor primer dan sekunder unggulan”

Adapun rumusan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2017 - 2022 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya saing dan produktifitas pelaku IKM.
2. Meningkatkan Efisiensi perdagangan dalam negeri dan mendorong peningkatan dan pengembangan ekspor
3. Mendorong pasar rakyat mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor koperasi.
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dicapai oleh Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi dan UKM kabupaten Kotawaringin Barat dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Berdasarkan rumusan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai di dalam Rencana Strategis (Renstra) 2017-2022 Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pertumbuhan IKM. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :

- Persentase Tingkat Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM).
- 2. Meningkatnya Nilai Tambah hasil produksi IKM. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :
 - Persentase Peningkatan Nilai tambah sektor IKM
- 3. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan pokok dan barang penting. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :
 - Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar waktu (YoY) kurang dari 9%
- 4. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor daerah. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :
 - Persentase Tingkat Pertumbuhan Nilai Ekspor Daerah
- 5. Meningkatnya pelayananan dibidang Kemetrolagian. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :
 - Persentase jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah.
- 6. Meningkatnya tata kelola Pasar Rakyat. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :
 - Persentase pengelolaan teknis pasar rakyat yang ditingkatkan
- 7. Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :
 - Persentase Koperasi Berkualitas
- 8. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :
 - Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru
- 9. Tumbuh dan Berkembangnya Usaha Mikro. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :
 - Persentase UKM terhadap UMKM

Adapun keterkaitan antara visi dan misi pembangunan daerah dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah serta target kinerja berdasarkan

indikator sasaran strategis selama 5 (lima) tahun periode renstra dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

Visi Pemerintah Daerah :	Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan dengan Kerja Nyata dan Ikhlas							
Misi 3 Pemerintah Daerah :	Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup							
Tujuan Renstra PD	Sasaran Renstra PD	Indikator Kinerja Sasaran PD	Target (%)					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan daya saing dan produktifitas pelaku IKM	Meningkatnya Pertumbuhan IKM	Persentase Tingkat Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	8	10	12	14	16	18
	Meningkatnya Nilai Tambah hasil produksi IKM	Persentase Peningkatan Nilai tambah sektor IKM	6	8	10	12	14	16
Meningkatkan Efisiensi perdagangan dalam negeri dan mendorong peningkatan dan pengembangan ekspor	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan pokok dan barang penting	Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar waktu (YoY) kurang dari 9%	< 9	< 9	< 9	< 9	< 9	< 9
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor daerah	Persentase Tingkat Pertumbuhan Nilai Ekspor Daerah	5	5	6	7	9	10
	Meningkatnya pelayananan dibidang Kemetrolagian	Persentase jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah	11,06	12,11	13,16	72	75	80
Mendorong pasar rakyat mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern	Meningkatnya tata kelola Pasar Rakyat	Persentase pengelolaan teknis pasar rakyat yang ditingkatkan	5,00	10,00	19,00	29,00	38,00	48,00
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor koperasi	Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat	Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	2,41	2,49	2,60	2,73	2,85	3,11
	Tumbuh dan Berkembangnya Usaha Mikro	Persentase UKM terhadap UMKM	1,21	1,23	1,25	1,27	1,29	1,31

Linearitas perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan rumusan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat dilihat pada bagan berikut :

Tabel Linearitas Tujuan Sasaran RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

Visi Pemerintah Daerah :	Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan dengan Kerja Nyata dan Ikhlas		
Misi 3 Pemerintah Daerah :	Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup		
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra PD	Sasaran Renstra PD
Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor primer dan sekunder unggulan	Meningkatnya Pertumbuhan IKM	Meningkatnya Pertumbuhan IKM
			Meningkatnya Nilai Tambah hasil produksi IKM
		Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan pokok dan barang penting	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan pokok dan barang penting
			Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor daerah
			Meningkatnya pelayananan dibidang Kemetrolagian
		Meningkatnya tata kelola Pasar Rakyat	Meningkatnya tata kelola Pasar Rakyat
		Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi	Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi
		Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif	Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif
Tumbuh dan Berkembangnya Usaha Mikro			

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Program dan kegiatan Pendanaan

Penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 terkait dengan kodifikasi dan klasifikasi bidang pembangunan disusun menurut fungsi untuk keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan pengembangan serta pengelolaan keuangan daerah serta memperhatikan pembagian kewenangan untuk masing-masing urusan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Pemerintah Daerah 23 tahun 2014.

Program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selama Renja tahun 2020 adalah program prioritas daerah yang tercantum didalam Renstra 2017-2022. Rencana program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Keperasi dan Usaha Kecil Menengah beserta indikator capaian kinerjanya sesuai dengan Renstra antara lain :

Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2020
SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Kode	Program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Renja 2020			Catatan Penting	Renja 2021	
			Lokasi	Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		100 persen	1.764.742.500,00		100 persen	1.764.742.500,00
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang tersampaikan	Kotawaringin Barat	35,00 paket	2.000.000,00		35,00 paket	2.000.000,00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet dan surat kabar	Kotawaringin Barat	12,00 Bulan	423.900.000,00		12,00 Bulan	423.900.000,00
	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah kompleks pasar daerah yang di asuransikan	Kotawaringin Barat	1,00 Pasar/ Komplek pasar	200.000.000,00		1,00 Pasar/ Komplek pasar	200.000.000,00
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Kotawaringin Barat	24,00 Unit	7.200.000,00		24,00 Unit	7.200.000,00
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi keuangan	Kotawaringin Barat	12,00 Bulan	370.138.250,00		12,00 Bulan	370.138.250,00
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Kotawaringin Barat	12,00 Bulan	41.567.200,00		12,00 Bulan	41.567.200,00
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	Kotawaringin Barat	76,00 Unit	45.770.000,00		76,00 Unit	45.770.000,00

**RENCANA KERJA DINAS PERINDAGKOP UKM
TAHUN 2020**

Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang diperlukan	Kotawaringin Barat	1,00	paket	80.817.050,00	1,00	paket	80.817.050,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kotawaringin Barat	12,00	Kegiatan	51.000.000,00	12,00	Kegiatan	51.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kotawaringin Barat	12,00	Jenis	15.000.000,00	12,00	Jenis	15.000.000,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kotawaringin Barat	12,00	unit	116.675.000,00	12,00	unit	116.675.000,00
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	Kotawaringin Barat	200,00	orang	18.375.000,00	200,00	orang	18.375.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Luar Kota	45,00	kegiatan	392.300.000,00	45,00	kegiatan	392.300.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur		90,00		244.985.000,00	90,00		207.283.500,00
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	Kotawaringin Barat	1,00	Paket	56.000.000,00		Paket	
Pengadaan mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	Kotawaringin Barat	2,00	paket	71.000.000,00	1,00	paket	85.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kotawaringin Barat	1,00	Unit	75.000.000,00	1,00	Unit	75.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Kotawaringin Barat	23,00	Unit	36.500.000,00	23,00	Unit	40.150.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kotawaringin Barat	5,00	Jenis	6.485.000,00	5,00	Jenis	7.133.500,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kotawaringin Barat	100,00		83.000.000,00	100,00		83.000.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kotawaringin Barat	1,00	dokumen	36.500.000,00	1,00	dokumen	36.500.000,00
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Kotawaringin Barat	1,00	dokumen	46.500.000,00	1,00	dokumen	46.500.000,00

**RENCANA KERJA DINAS PERINDAGKOP UKM
TAHUN 2020**

Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur		100,00		156.519.000,00	100,00		172.170.900,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Kotawaringin Barat	68,00	Stel	51.909.000,00	68,00	Stel	57.099.900,00
Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	Kotawaringin Barat	78,00	Stel	57.420.000,00	78,00	Stel	63.162.000,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Kotawaringin Barat	78,00	stel	47.190.000,00	78,00	stel	51.909.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya		94,00		189.000.000,00	100,00		194.000.000,00
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis	Luar Kota	16,00	Orang	189.000.000,00	16,00	Orang	194.000.000,00
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT		10,00	%	170.000.000,00	10,00	%	163.000.000,00
Peningkatan Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi yang mampu menyusun Laporan Pertanggungjawaban Koperasi	Kotawaringin Barat	50,00	Koperasi	38.000.000,00	60,00	Koperasi	45.000.000,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Koperasi	Jumlah koperasi yang Terpantau / Termonitor	Kotawaringin Barat	40,00	Koperasi	54.000.000,00	40,00	Koperasi	56.000.000,00
Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah rekomendasi pembubaran koperasi	Kotawaringin Barat	35,00	Koperasi	30.000.000,00	1,00	Koperasi	10.000.000,00
Peningkatan Pemahaman Prinsip-Prinsip Perkoperasian	Jumlah Koperasi yang mengikuti sosialisasi	Kotawaringin Barat	40,00	Koperasi	48.000.000,00	50,00	Koperasi	52.000.000,00
Program Pengembangan Usaha Koperasi	Jumlah Usaha Koperasi yang berkembang		43,00	Koperasi	226.000.000,00	43,00	Koperasi	230.000.000,00
Pelatihan Manajemen Usaha Simpan Pinjam	Jumlah koperasi yang mendapatkan Pelatihan Managerial Koperasi Simpan Pinjam	Kotawaringin Barat	40,00	Koperasi	43.000.000,00	40,00	Koperasi	43.000.000,00
Penguatan Permodalan Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Sosialisasi Penguatan Permodalan yang terselenggara	Kotawaringin Barat	20,00	Koperasi	35.000.000,00	20,00	Koperasi	36.000.000,00
Temu Usaha bagi Pelaku Perkoperasian	Jumlah koperasi yang mengikuti Fasilitasi Kemitraan usaha Koperasi dengan Perusahaan Besar	Kotawaringin Barat	20,00	Koperasi	32.000.000,00	20,00	Koperasi	34.000.000,00

**RENCANA KERJA DINAS PERINDAGKOP UKM
TAHUN 2020**

Pengembangan Promosi Hasil Usaha Koperasi	Jumlah Koperasi yang di fasilitasi terkait Promosi Hasil Usaha Koperasi	Kotawaringin Barat	3,00	Koperasi	102.000.000,00	3,00	Koperasi	102.000.000,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Koperasi Simpan Pinjam	Kotawaringin Barat	40,00	Laporan	14.000.000,00	40,00	Laporan	15.000.000,00
Program Penumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah Wirausaha Baru		100,00	WUB	55.000.000,00	120,00	WUB	70.000.000,00
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah wirausaha baru	Kotawaringin Barat	100,00	Orang	55.000.000,00	120,00	Orang	70.000.000,00
	Persentase UKM terhadap UMKM		1,27		157.000.000,00	1,29		162.000.000,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Berkembang		40,00	UKM	157.000.000,00	40,00	UKM	162.000.000,00
Peningkatan Kualitas, Kompetensi manajerial SDM Usaha Mikro	Jumlah UKM yang mendapatkan Pelatihan Manajerial Usaha Mikro	Kotawaringin Barat	40,00	UKM	50.000.000,00	40,00	UKM	51.000.000,00
Penguatan Kelembagaan dan Organisasi Kelompok Usaha Mikro	Jumlah UKM yang mendapatkan sosialisasi Izin Usaha	Kotawaringin Barat	80,00	UKM	33.000.000,00	80,00	UKM	35.000.000,00
Pengembangan Promosi Hasil Produksi Usaha Mikro	Jumlah UKM yang terfasilitasi terkait promosi hasil produksi	Kotawaringin Barat	60,00	UKM	74.000.000,00	60,00	UKM	76.000.000,00
Program Stabilisasi Harga Komoditas Perdagangan	Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar waktu (YoY) kurang dari 9%		8,50	(%)	85.000.000,00	8,00	(%)	94.000.000,00
Monitoring dan Evaluasi distribusi dan harga barang dalam pengawasan	Jumlah produk yang diawasi	Kotawaringin Barat	2,00	Produk	22.000.000,00	2,00	Produk	24.000.000,00
Monitoring dan penyebaran informasi perkembangan harga komoditas	Jumlah terbitan Perkembangan Harga Komoditas yang di publikasi	Kotawaringin Barat	104,00	Terbitan	35.000.000,00	104,00	Terbitan	40.000.000,00
Operasi Pasar dan Pasar Murah	Jumlah Paket Sembako yang terdistribusikan ke masyarakat berpenghasilan rendah	Kotawaringin Barat	1.800,0	Paket	28.000.000,00	1.800,0	Paket	30.000.000,00
Program Pemberantasan barang kena cukai ilegal	Persentase tertib niaga barang kena cukai		90,00	(%)	66.000.000,00	91,00	(%)	67.000.000,00
Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal	Jumlah kecamatan yang terpetakan terkait peredaran cukai ilegal	Kotawaringin Barat	6,00	Kecamatan	66.000.000,00	6,00	Kecamatan	67.000.000,00

**RENCANA KERJA DINAS PERINDAGKOP UKM
TAHUN 2020**

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase Tingkat Pertumbuhan Nilai Ekspor Daerah		7,00				9,00		
Pengembangan Promosi Produk Potensi Ekspor	Pertumbuhan Realisasi Export		7,00	%	168.807.100,00		8,00	%	185.687.810,00
	Jumlah Pameran Promosi yang diikuti	Palangka raya	1,00	Pameran	168.807.100		1,00	Pameran	185.687.810
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	persentase pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran;		1,00	persen	275.000.000,00		1,00	persen	302.000.000,00
Pengembangan Promosi Perdagangan dalam Negeri	Jumlah Pameran promosi yang terselenggara	Kotawaringin Barat	1,00	Pameran	275.000.000		1,00	Pameran	302.000.000
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga		72,00	%	74.505.000,00		75,00	%	83.605.000,00
Pendataan potensi pemanfaatan Alat UTTP	Jumlah Data potensi pemanfaatan Alat UTTP	Kotawaringin Barat	1.050,00	Unit	12.500.000		1.100,00	Unit	14.800.000
Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Alat UTTP	Jumlah alat UTTP yang di Tera dan Tera Ulang	Kotawaringin Barat	30,00	%	17.200.000		40,00	%	19.000.000
Pengawasan Kemetrolgian	Jumlah Alat Metrologi yang diawasi	Kotawaringin Barat	50,00	Unit	12.000.000		60,00	Unit	14.000.000
Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Tertib Niaga Bagi Pelaku Usaha dan Masyarakat	Jumlah kecamatan yang Tertib Niaga	Kotawaringin Barat	6,00	Kecamatan	17.805.000		6,00	Kecamatan	17.805.000
Pembentukan Pasar Tertib Ukur dan Daerah Tertib Ukur	Jumlah pasar tertib ukur	Kotawaringin Barat	1,00	Pasar	15.000.000		1,00	Pasar	18.000.000
Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar	Jumlah Sarana Prasaran dan Pengelolaan Pasar Rakyat yang ditingkatkan		3,00	Pasar	4.776.185.600,00		3,00	Pasar	4.857.000.000,00
Pembangunan / Revitalisasi Pasar Rakyat	Jumlah Sarana Prasaran dan Pengelolaan Pasar Rakyat yang ditingkatkan	Kotawaringin Barat	1,00	Pasar Rakyat	1.500.000.000,00		1,00	Pasar Rakyat	1.500.000.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah Pengadaan Sarana dan prasarana pasar rakyat	Kotawaringin Barat	1,00	Paket	200.000.000,00		1,00	Paket	200.000.000,00
	Jumlah Pengadaan Tong Sampah dan Alat Angkutnya	Kotawaringin Barat	1,00	Paket	200.000.000,00		1,00	Paket	200.000.000,00

**RENCANA KERJA DINAS PERINDAGKOP UKM
TAHUN 2020**

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah sarana dan prasaran pasar yang terpelihara	Kotawaringin Barat	1,00	Paket	205.000.000,00	1,00	Paket	205.000.000,00
Pembinaan Kebersihan dan Ketertiban Pasar	Jumlah Pedagang pasar yang terbina	Kotawaringin Barat	120,00	Pedagang Pasar	57.000.000,00	120,00	Pedagang Pasar	58.000.000,00
	Jumlah petugas kebersihan dan ketertiban serta petugas pungut retribusi pasar yang dibayarkan Honorariumnya		74,00	Orang	2.529.185.600,00	74,00	Orang	2.606.000.000,00
Penguatan Kelembagaan Kelompok Pedagang Pasar	Jumlah Asosiasi Pedagang Pasar	Kotawaringin Barat	1,00	Asosiasi Pedagang Pasar	50.000.000,00	1,00	Asosiasi Pedagang Pasar	50.000.000,00
Pendataan dan Penyusunan Profil Pasar Rakyat	Jumlah Profil Pasar Rakyat	Kotawaringin Barat	3,00	Profile Pasar Rakyat	35.000.000,00	3,00	Profile Pasar Rakyat	38.000.000,00
Program Pengembangan Sentra dan Klaster Industri	Jumlah IKM potensial		14	IKM	34.000.000	16	IKM	34.000.000
Pemetaan dan Pemutakhiran data IKM	Jumlah IKM Potensial yang terpetakan	Kotawaringin Barat	6	Kecamatan	34.000.000	6	Kecamatan	34.000.000
Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Jumlah Industri Kecil Menengah yang Berkembang		45,00	IKM	284.150.000,00	55,00	IKM	313.565.000,00
Peningkatan Kualitas dan Diversifikasi Produk IKM	Jumlah IKM yang mendapatkan Pelatihan	Kotawaringin Barat	40	IKM	90.000.000	50	IKM	100.000.000
Pengembangan Teknologi Produksi IKM	Jumlah bantuan mesin dan atau peralatan bagi pelaku IKM	Kotawaringin Barat	2	Unit	55.000.000	2	Unit	60.500.000
Pengembangan promosi produk IKM	Jumlah IKM yang mengikuti Pameran	Jakarta	3,00	IKM	139.150.000	3,00	IKM	153.065.000
Program perlindungan HKI dan standarisasi Industri	Jumlah IKM yang difasilitasi dalam standarisasi Industri		18,00	IKM	145.000.000	20,00	IKM	161.000.000
Standardisasi industri	Jumlah IKM yang difasilitasi mendapatkan sertifikasi Halal	Kotawaringin Barat	18	IKM	117.000.000	20	IKM	130.000.000
Diseminasi Perluasan Penerapan Standardisasi Industri	Jumlah Ikm yang mengikuti sosialisasi sistem jaminan halal	Kotawaringin Barat	20	IKM	28.000.000	20	IKM	31.000.000
				Total	8.954.894.200,00			9.144.054.710,00

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan berisikan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini sebagai acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2020 untuk menjawab atau meminimalisir isu-isu terkini dan permasalahan-permasalahan di Bidang Industri Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Sebagai tindak lanjut dalam penyusunan Renja ini selanjutnya kami akan menyusun program kegiatan dan anggaran dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2020.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga program dan kegiatan tersebut dapat dicapai secara baik dan maksimal.

Kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan dan perbaikan penyusunan rencana kerja di masa yang akan datang.

Pangkalan Bun, 24 Juli 2019

Kepala Dinas Perindagkop UKM
Kabupaten Kotawaringin Barat



Drs. MUHAMMAD YADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19610420 198903 1 009

LAMPIRAN

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2018
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017-2022		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun (2017+2018)	
				K	RP	K	RP
1	2	3	4	5		6	
				K	RP	K	RP
	2.11	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah					
	2.11.2.11.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100	9.867.651.110,00	20	2.680.651.312,00
	2.11.2.11.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang tersampaikan	210	11.625.000,00	70,00	3.003.000
	2.11.2.11.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet dan surat kabar	72	1.471.992.000,00	24,00	327.537.022
	2.11.2.11.01.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah komplek pasar daerah yang di asuransikan	5	1.000.000.000,00	2,00	200.000.000
	2.11.2.11.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	143	37.000.000,00	48,00	6.716.800
	2.11.2.11.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan administrasi keuangan	72		24,00	

					2.288.383.800,00		541.251.330
2.11.2.11.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	72		247.833.000,00	24,00	73.540.000
2.11.2.11.01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	416		286.460.000,00	134,00	75.905.000
2.11.2.11.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang diperlukan	6		504.092.850,00	2,00	177.384.150
2.11.2.11.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	72		306.501.500,00	24,00	99.866.600
2.11.2.11.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	84		88.527.960,00	28,00	28.094.460
2.11.2.11.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	105		751.397.500,00	25,00	216.397.500
2.11.2.11.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman rapat	3.500,00		187.637.500,00	700,00	47.817.500
2.11.2.11.01.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	353		2.686.200.000,00	97,00	883.137.950
2.11.2.11.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100		1.694.067.958,83	20	429.776.240,00
2.11.2.11.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun atau di tingkatkan	6		375.000.000,00	1,00	57.000.000,00
2.11.2.11.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Kelengkapan gedung kantor yang di tingkatkan	64		223.000.000,00	26,00	55.000.000,00

2.11.2.11.01.02.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	203	170.000.000,00	0,00	0,00
2.11.2.11.01.02.13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	6	220.800.240,00	2,00	136.464.240,00
2.11.2.11.01.02.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	138	220.800.240,00	46,00	155.554.000,00
2.11.2.11.01.02.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	66	436.607.550,00	22	12.879.000
2.11.2.11.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di rehab	8	47.859.928,83	1	12.879.000
2.11.2.11.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100	567.999.468,00	20	222.059.800,00
2.11.2.11.01.03.01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin absensi fingerprint yg diadakan	3	42.000.000,00	1,00	6.000.000,00
2.11.2.11.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	408	413.185.197,00	136,00	56.220.000,00
2.11.2.11.01.03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	390	283.032.436,00	156,00	92.364.000,00
2.11.2.11.01.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	468	242.967.032,00	156,00	67.475.800,00
2.11.2.11.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnyanya	100	948.000.000,00	20	285.767.400,00

2.11.2.11.01.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis	95	948.000.000,00	34,00	285.767.400,00
2.11.2.11.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	384.468.750,00	20	24.867.750,00
2.11.2.11.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6	147.006.250,00	2,00	1.006.250,00
2.11.2.11.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	6	237.462.500,00	2,00	23.861.500,00
2.11.2.11.01.15	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Peningkatan Koperasi yang melaksanakan RAT	60	892.812.500,00	20,00	292.349.600,00
2.11.2.11.01.15.01	Peningkatan Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi yang mampu menyusun Laporan Pertanggungjawaban Koperasi	240	181.000.000,00	120,00	58.356.500,00
2.11.2.11.01.15.02	Peningkatan Pemahaman Prinsip-Prinsip Perkoperasian	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/lomba	540	251.000.000,00	120,00	84.897.900,00
2.11.2.11.01.15.03	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Koperasi yang dinilai terkait Penilaian dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	30	190.000.000,00	10,00	92.052.200,00
2.11.2.11.01.15.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Koperasi	Jumlah koperasi yang Terpantau / Termonitor	214	270.812.500,00	24,00	57.043.000,00

2.11.2.11.01.16	Program Pengembangan Usaha Koperasi	Persentase Volume Usaha Koperasi yang meningkat	30	564.000.000,00	10	173.449.600,00
2.11.2.11.01.16.04	Pelatihan manajemen usaha simpan pinjam	Jumlah peserta pelatihan managerial koperasi simpan pinjam	200	162.000.000,00	80,00	82.037.300,00
2.11.2.11.01.16.04	Pengembangan Promosi Hasil Usaha Koperasi	Jumlah UKM yang terfasilitasi terkait promosi hasil produksi	15	498.000.000,00	6,00	82.037.300,00
2.11.2.11.01.16.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Usaha Simpan Pinjam	Jumlah laporan hasil monitoring koperasi simpan pinjam	200	66.000.000,00	80,00	9.375.000,00
2.11.2.11.01.17	Penumbuhan Wirausaha Baru	Wirausaha baru	400	371.360.000,00	40,00	162.527.000,00
2.11.2.11.01.17.01	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan Kewirausahaan	400	371.360.000,00	40,00	162.527.000,00

2.11.2.11.01.18	Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Mikro	Usaha Mikro yang Berkembang	211	370.138.000,00	51,00	214.568.000,00
2.11.2.11.01.18.03	Pengembangan Promosi Hasil Produksi Usaha Mikro	Jumlah UKM yang terfasilitasi terkait promosi hasil produksi	360	370.138.000,00	120,00	214.568.000,00
2.11.2.11.01.19	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	Persentase Peningkatan Produktifitas UMKM	36	1.400.000.000,00		
2.11.2.11.01.19.01	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DAK)	Jumlah SDM Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) yang ditingkatkan.	448	1.400.000.000,00	0	0
					0	0
3.06	Urusan Perdagangan					
3.06.2.11.01.16	Program Stabilisasi Harga Komoditas Perdagangan	fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar waktu (MoM) kurang dari 9%	53,40	398.155.000,00	4,80	71.485.500,00
3.06.2.11.01.16.01	Monitoring dan Evaluasi Distribusi dan Harga Barang Dalam Pengawasan	Jumlah produk yang diawasi	10,00	109.155.000,00	4,00	12.235.500,00

3.06.2.11.01.16.02	Monitoring dan Penyebaran Informasi Perkembangan Harga Komoditas	Jumlah terbitan Perkembangan Harga Komoditas yang di publikasi	624,00	173.000.000,00	208,00	24.250.000,00
3.06.2.11.01.16.03	Operasi Pasar dan Pasar Murah	Jumlah paket sembako yang terdistribusikan ke masyarakat	7.200,00	116.000.000,00	3.600,00	35.000.000,00
3.06.2.11.01.17	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Cakupam program pemberantasan barang kena cukai ilegal	95,00	393.550.000,00	190	141.490.000,00
3.06.2.11.01.17.01	Pengumpulan Informasi Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	Jumlah laporan terkait peredaran cukai ilegal	27,00	393.550.000,00	18,00	141.490.000,00
3.06.2.11.01.19	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Realisasi Nilai Ekspor (\$US Jt)	837,38	851.722.501,00	553,00	135.760.000,00
3.06.2.11.01.19.01	Pengembangan Promosi Produk Potensi Ekspor	Jumlah Pameran Promosi yang diikuti	6,00	851.722.501,00	2,00	135.760.000,00
3.06.2.11.01.20	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Persentase peningkatan omset pelaku usaha	52,00	1.387.570.000,00	16	556.209.100,00
3.06.2.11.01.20.01	Pengembangan Promosi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah Pameran promosi yang terselenggara/diikuti	20,00	1.387.570.000,00	2,00	556.209.100,00
3.06.2.11.01.21	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase Kepuasan Konsumen Terhadap Alat UTTP	70	380.783.000,00	50	68.887.500,00
3.06.2.11.01.21.01	Pendataan Potensi Pemanfaatan Alat UTTP	Jumlah Data potensi pemanfaatan Alat UTTP	6100	64.400.000,00	1.800,00	3.930.000,00
3.06.2.11.01.21.02	Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Alat UTTP	Jumlah alat UTTP yang di Tera dan Tera Ulang	5700	87.104.000,00	1.398,00	22.472.500,00

3.06.2.11.01.21.03	Pengawasan Kemetrolgian	Jumlah alat metrologi yang di awasi	250			
				61.299.000,00	80,00	8.480.000,00
3.06.2.11.01.21.04	Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Tertib Niaga Bagi Pelaku Usaha dan Masyarakat	Jumlah Peserta sosialisasi tertib niaga	360	110.895.000,00	120,00	25.955.000,00
3.06.2.11.01.21.05	Pembentukan Pasar Tertib Ukur dan Daerah Tertib Ukur	Jumlah Peserta sosialisasi tertib niaga	6,00	90.000.000,00	2,00	8.050.000,00
3.06.2.11.01.21.06	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT kemetrolgian daerah	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kemetrolgian	258,00	57.085.000,00	174,00	8.050.000,00
3.06.2.11.01.22	Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar	Persentase pasar rakyat yang ditingkatkan pengelolaannya	78	65.590.873.100,00	26	33.377.107.800,00
3.06.2.11.01.22.01	Pembangunan / Revitalisasi Pasar Rakyat	Jumlah pasar rakyat yang dibangun / direvitalisasi	18	49.857.470.100,00	6	28.362.555.100,00
3.06.2.11.01.22.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah pengadaan sarana dan prasaran pasar rakyat	5	1.000.000.000,00	0,00	0
3.06.2.11.01.22.03	Pembinaan Kebersihan dan Ketertiban Pasar	Jumlah pedagang pasar yang terbina	600,00	283.915.000,00	120,00	51.030.000,00
		Jumlah penyediaan honorarium petugas pungut, kebersihan dan ketertiban pasar	5.616,00	14.071.488.000,00	1.872,00	4.690.496.000,00
3.06.2.11.01.22.05	Pendataan dan Penyusunan Profil Pasar Rakyat	Jumlah data / profil pasar rakyat	12	178.000.000,00	2,00	28.905.500,00
3.06.2.11.01.22.06	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah sarana dan prasarana pasar yang terpelihara	12	200.000.000,00	2,00	244.121.200,00

3.07	Urusan Perindustrian					
3.07.2.11.01.15	Program Pengembangan Sentra dan Klaster Industri	Persentase Tingkat Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	51	170.000.000,00	16	45.375.000,00
3.07.2.11.01.15.01	Pemetaan dan Pemutakhiran Data IKM	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan/ Pemutakhiran Data IKM	6	170.000.000,00	2,00	45.375.000,00
3.07.2.11.01.16	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Persentase Peningkatan Nilai Produksi IKM	68	3.000.964.000,00	16	252.724.850,00
3.07.2.11.01.16.01	Peningkatan Kualitas dan Diversifikasi Produk IKM	Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan	200	456.587.500	60,00	49.859.850,00
3.07.2.11.01.16.02	Pengembangan Teknologi Produksi IKM	Jumlah bantuan mesin dan atau peralatan bagi pelaku IKM	24	1.842.290.000	1	50.650.000,00
3.07.2.11.01.16.03	Pengembangan Promosi Produk IKM	Jumlah IKM yang Mengikuti Pameran	15	702.086.500	6,00	202.865.000,00
3.07.2.11.01.17	Program Perlindungan HKI dan Standardisasi Industri	Persentase IKM Potensial Pangan yang terfasilitasi mendapatkan Standardisasi	30	694.623.000,00	5,00	92.696.500,00
3.07.2.11.01.17.01	Standardisasi Industri	Jumlah IKM yang difasilitasi mendapatkan sertifikasi Halal	81	552.903.000,00	10,00	73.331.000,00
3.07.2.11.01.17.02	Diseminasi Perluasan Penerapan Standardisasi Industri	Jumlah Ikm yang mengikuti sosialisasi sistem jaminan halal	100	141.720.000,00	20,00	19.365.500,00
Jumlah						39.227.752.952